

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPPA Provinsi Sumatera Selatan serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, mewujudkan kesetaraan gender, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
2. Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
4. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
5. Penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, Tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka--Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, khususnya upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, semaksimal mungkin melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi 1 yaitu : **Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.**

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 3) Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan
- 5) Meningkatnya Derajat Kesehatan
- 6) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan

7) Meningkatnya Kesetaraan Gender

8) Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan I Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

- Sasaran
- 1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan;
 - 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
 - 1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030 DPPPA Prov. Sumsel

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kesenjangan Gender	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	1.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,479	0,465	0.453	0.441	0.428	0.416	0.403	Indikator negatif
Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,87	93,93–93,99	93,99–94,10	94,07–94,18	94,13–94,21	94,19–94,29	94,25–94,38	Indikator positif
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35%	57,12%	57,30%	57,50%	58,00%	58,50%	58,75%	Indikator positif
		1.2 Meningkatkan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	Indikator positif

		1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif
			Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak. Adapun uraian setiap indikator adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**, merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana perbedaan akses, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh perempuan dibandingkan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memiliki nilai antara 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilainya menunjukkan semakin kecil tingkat ketimpangan gender.

Nilai IKG yang tinggi menandakan masih terdapat kesenjangan yang signifikan, baik dalam aspek kesehatan ibu dan remaja, keterwakilan perempuan dalam pendidikan dan politik, maupun keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Sebagai indikator utama, IKG digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Selain itu, IKG juga menjadi tolok ukur dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5 tentang Kesetaraan Gender.

Dengan demikian, pencapaian target penurunan IKG menjadi salah satu prioritas strategis yang harus diperhatikan dalam setiap program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

2. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan. IPG dihitung sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang mencerminkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Semakin tinggi nilai IPG, menunjukkan semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia. Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, IPG masih menghadapi tantangan akibat adanya ketimpangan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, kesempatan kerja yang layak, serta kepemilikan pendapatan yang berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan nilai IPG menjadi target prioritas dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Target peningkatan IPG diarahkan untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD. Upaya strategis yang dilakukan antara lain melalui penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang responsif gender, serta pemberdayaan ekonomi perempuan untuk memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang usaha.

Dengan strategi tersebut, diharapkan nilai IPG Provinsi Sumatera Selatan meningkat secara bertahap setiap tahunnya, sehingga kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dipersempit, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan dapat semakin optimal.

3. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**, Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan dalam pasar kerja sebagai salah satu aspek penting kesetaraan gender di bidang ekonomi.

4. **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak di daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan bagaimana perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak yang rentan.

Dalam periode Renstra 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan adanya peningkatan nilai Indeks Perlindungan Anak secara bertahap dari baseline tahun 2024, sehingga pada akhir periode diharapkan indeks ini dapat mencapai kategori **“Baik”**. Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang perlindungan anak. Strategi pencapaian target IPA dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, penyediaan layanan ramah anak, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha, dan media.

Dengan upaya tersebut diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan skor indeks secara kuantitatif, tetapi juga tercipta lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi setiap anak di Sumatera Selatan.

5. **Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan** adalah indikator ini mengukur tingkat keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga penyedia layanan, baik di tingkat provinsi maupun lintas kabupaten/kota. Kasus yang dimaksud mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilaporkan

dan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Selatan.

6. **Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan** adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh lembaga layanan, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah diselesaikan melalui proses pelayanan, mediasi, pendampingan hukum, atau penyelesaian lainnya, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan.

Indikator ini mencerminkan kemampuan dan kinerja unit layanan (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak anak korban kekerasan secara optimal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja utama DPPPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPPPA Prov. Sumsel

No	Sasaran	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KET
1	2	3	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,465	Indikaor negative
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,93–93,99	Indikaor positif
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	57,12%	Indikaor positif
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,00	Indikaor positif

	dan Perlindungan Khusus Anak			
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	Indikator positif
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	Indikator positif

2.4. Rencana Anggaran

Rencana anggaran disusun sebagai dasar pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyusunan rencana anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

TABEL 2.3
RENCANA ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (INDUK)	ANGGARAN (PERUBAHAN)
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 2.400.000.000,-	Rp. 1.365.584.500,-
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.290.000.000,-	Rp. 205.200.000,-

2	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	• Program Pemenuhan Hak Anak • Program Peningkatan Kualitas Keluarga	• Rp. 610.000.000,- • Rp. 300.000.000,-	• Rp. 410.000.000, -,- • Rp. 148.400.000,-
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	• Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak	• Rp. 512.400.000,- • Rp. 1.270.000.000,-	• Rp. 377.138.000,- • Rp. 1.131.084.400,-
4	Penunjang	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	• Rp. 14.502.188.000,-	• Rp. 12.809.191.500,-
Total			Rp. 19.884.588.000,-	Rp. 16.447.258.400,-

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 21 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

TABEL 2.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,809,191,500
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,921,475,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,187,823,000
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	503,152,000
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,500,000
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130,600,000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	55,600,000
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	895,340,500
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,500,000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,000,000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000

15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508,840,500
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676,000,000
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280,000,000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326,000,000
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,170,776,000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409,000,000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,776,000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,736,000,000
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,365,584,500
i	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	265,400,000
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	141,400,000
24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	124,000,000

ii	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	206,700,000
25	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	55,400,000
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	151,300,000
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	893,484,500
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	769,934,500
28	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50,000,000
29	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	73,550,000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	377,138,000
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65,440,000

30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	65,440,000
ii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192,390,000
31	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	112,390,000
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	119,308,000
33	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	86,837,000
34	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,471,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	148,400,000
i	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	80,700,000

35	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	80,700,000
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	22,700,000
36	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	22,700,000
iii	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan HAK Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000
37	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205,200,000
i	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205,200,000
38	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	116,486,000
39	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	88,714,000
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	410,660,000
i	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	120,640,000

40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	61,200,000
41	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	59,440,000
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	290,020,000
42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84,520,000
43	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	205,500,000
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,131,084,400
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137,000,000
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	87,000,000
45	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	50,000,000

ii	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	301,322,000
46	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000
47	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	251,322,000
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	692,762,400
48	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000
49	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	642,762,400
	Jumlah	16,447,258,400

